

PENGUSAHAAN TANAMAN TEBU DI JAWA TIMUR TAHUN 1975-1997

Siti Munayah

Jurusan Pendidikan Sejarah
Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
Universitas Negeri Surabaya
E-mail : sitimunayah@mhs.unesa.ac.id

Nasution

Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
Universitas Negeri Surabaya
E-mail : nasution@unesa.ac.id

Abstrak

Pengusahaan tanaman tebu di Jawa Timur pada mulanya menggunakan sistem sewa tanah antara petani dengan pabrik gula. Seiring berjalannya waktu sistem sewa tanah tidak berjalan dengan baik, terdapat konflik antara petani tebu dengan pabrik gula. Tujuan dari penelitian ini untuk (1) menganalisis pengusahaan tanaman tebu di Jawa Timur tahun 1975-1997; (2) menganalisis kehidupan sosial-ekonomi petani tebu di Jawa Timur tahun 1975-1997.

Berdasarkan hasil analisa dan penemuan fakta sumber sejarah maka diperoleh hasil bahwa, adanya pengalihan pengusahaan tebu dari pabrik gula ke petani pemilik lahan. Pengalihan pengusahaan tersebut dampak dari diterbitkannya Inpres No.9 Tahun 1975 mengenai Tebu Rakyat Intensifikasi (TRI). Tujuan dari TRI yaitu meningkatkan pendapatan petani serta menjadikan petani menjadi tuan di atas lahannya sendiri. Namun tujuan tersebut tampaknya belum bisa tercapai. Terdapat banyak petani yang lebih memilih menyewakan lahan mereka, kehidupan petani masih belum bisa dikatakan sejahtera, masih banyak petani yang mengalami kesulitan masalah ekonomi. Hal tersebut terjadi karena banyaknya pihak yang terlibat yang ikut bermain dalam proses pelaksanaan program TRI.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah yang terdiri dari empat tahapan yaitu, heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Tahapan heuristik yaitu pengumpulan sumber yang didapatkan dari Perpustakaan Universitas Negeri Surabaya, Perpustakaan Stikosa, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur, Perpustakaan C2O, dan Perpustakaan Medayu Agung. Kritik sumber yaitu melakukan pengujian terhadap sumber yang diperoleh. Intepertasi yaitu penafsiran yang berkaitan dengan fakta sejarah. Selanjutnya historiografi yaitu penulisan hasil penelitian sejarah.

Kata Kunci : Petani Tebu, TRI (Tebu Rakyat Intensifikasi), Pabrik Gula

Abstract

Sugarcane cultivation in East Java initially used a land lease system between farmers and sugar factories. Over time the land rental system did not work well, there were conflicts between sugarcane farmers and sugar factories. The aims of this study were to (1) analyze sugarcane cultivation in East Java in 1975-1997; (2) analyzing the socio-economic life of sugarcane farmers in East Java in 1975-1997.

Based on the results of the analysis and discovery of historical sources, the results obtained are that there is a transfer of sugar cane from the sugar factory to the land-owning farmers. The transfer of business was the impact of the issuance of Presidential Instruction No. 9 of 1975 concerning People's Sugar Cane Intensification (TRI). The purpose of TRI is to increase farmers' income and make farmers become masters of their own land. However, this goal does not appear to have been achieved. There are many farmers who prefer to rent out their land, the life of farmers is still not prosperous, there are still many farmers who are experiencing economic difficulties. This happened because of the many parties involved who played in the process of implementing the TRI program.

This study uses a historical research method consisting of four stages, namely, heuristics, source criticism, interpretation, and historiography. The heuristic stages are collecting sources obtained from the Surabaya State University Library, Stikosa Library, East Java Provincial Library and Archives Service, C2O Library, and Medayu Agung Library. Source criticism is to test the sources obtained. Interpretation is an interpretation related to historical facts. Furthermore, historiography is the writing of historical research results.

Keywords : Sugarcane Farmers, TRI (People's Sugar Cane Intensification), Sugar Factory

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara pertanian, yangmana sebagian besar penduduk Indonesia hidup dan mengandalkan perekonomian mereka dari bertani, hal tersebut menjadikan sektor pertanian memegang peranan penting dalam perekonomian nasional¹. Salah satu hasil sektor perekonomian Indonesia adalah gula. Industri gula di Jawa merupakan warisan dari zaman kolonial. Pada masa itu pemerintah menyewa tanah atau lahan milik petani untuk ditanami tanaman tebu. Namun pada tahun 1830 muncul kebijakan sistem tanam paksa yang diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan kapasitas pertanian orang Jawa demi keuntungan perekonomian Kerajaan Belanda². Dalam pelaksanaan sistem tanam paksa petani dibebaskan dalam membayar pajak, namun sebagai gantinya petani harus bersedia untuk menanam tanaman ekspor. Salah satu tanaman ekspor yang wajib ditanam oleh petani yaitu tebu. Tebu merupakan tanaman tahunan yangmana penanamannya bergantian dengan tanaman padi. Sehingga petani harus menyiapkan lahan yang luas untuk menanam tebu. Petani juga diharuskan untuk bekerja di perkebunan tebu, sehingga mereka tidak memiliki kesempatan untuk menanam tanaman pangan lainnya seperti padi dan jagung. Pada tahun 1970 Sistem Tanam Paksa dihapuskan karena dirasa sudah menysengsarakan rakyat.

Setelah dihapusnya Sistem Tanam Paksa, Pabrik Gula menjalin hubungan kerja sama dengan petani, yangmana disini Pabrik Gula menyewa lahan milik petani dan petani dijadikan buruh pekerja kasar. Seiring berjalannya waktu ternyata hubungan antara petani dan Pabrik Gula tidak berjalan harmonis. Karena menurut petani, Pabrik Gula memberikan uang sewa yang terlalu rendah. Sehingga sempat terjadi konflik antara pabrik gula dengan petani. Dari konflik tersebut pemerintah menjadi penengah antara Pabrik Gula dan petani. Dari permasalahan tersebut, sehingga muncullah ide dari pemerintah bagaimana jika pabrik gula tidak menyewa tanah milik petani, melainkan pabrik gula membeli tebu petani, sehingga dikeluarkannya Inpres No 9 tanggal 22 April 1975 tentang Tebu Rakyat Intensifikasi (TRI)³.

Dengan dikeluarkannya program Tebu Rakyat Intensifikasi ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan petani tebu. Karena sesuai dengan isi yang tertuang dalam Inpres No 9 tanggal 22 April 1975 yakni, pengalihan dari sistem sewa menjadi petani yang menjadi tuan di atas lahannya sendiri atau petani yang menanam tebu di atas lahannya sendiri, pabrik gula harus memberikan penyuluhan agar program intensifikasi dapat berjalan lancar, pemerintah menyediakan kredit usaha bagi petani yang

memerlukan, pabrik gula bertugas dalam hal penggilingan tebu menjadi gula, serta pihak koperasi ikut serta dalam membimbing petani dalam meningkatkan penghasilannya⁴. Dengan adanya tujuan tersebut, maka diharapkan petani dapat menjadi wiraswasta yang mandiri.

Melalui Inpres No 9 tanggal 22 April 1975 tentang Tebu Rakyat Intensifikasi (TRI) ini terdapat perubahan dalam sistem produksi, yangmana pengusahaan tebu sepenuhnya diserahkan ke petani, sedangkan pabrik gula hanya sebagai pengolah⁵. Karena disini petani mulai menanam sendiri tebu di lahan milik mereka kemudian mereka menjualnya ke pabrik gula. Selama masa TRI, petani juga menjadi lebih bebas dalam menentukan sendiri kapan mulai menanam ataupun menyerahkan tanah kepada kelompok tani. Dengan begitu petani tidak lagi dijadikan sebagai budak di tanah mereka sendiri⁶. Adanya perubahan sistem tersebut, diharapkan petani dapat menikmati hasil dari apa yang mereka peroleh dari lahan mereka. Selain itu petani juga harus menerima kondisi untung dan rugi dari apa yang mereka kelola dari lahan mereka.

Selain itu program TRI ini juga mendapat banyak protes dari petani. Banyak petani tebu yang tidak puas akan kebijakan yang ditentukan dalam program TRI ini. Banyak petani yang merasa bahwa dengan menanam lahan mereka dengan tanaman tebu, penghasilan mereka tidak lebih banyak jika ditanami dengan tanaman padi. Hal tersebut berarti bahwa dengan menanam tebu, maka penghasilan mereka menjadi lebih sedikit. Semua itu dipengaruhi oleh banyak sedikitnya randemen tebu, semakin tinggi tingkat randemen tebu maka semakin banyak penghasilan yang mereka peroleh⁷. Namun jika lahan mereka ditanami dengan tanaman padi, maka mereka dapat panen dua kali dalam setahun dan palawija sekali, dan jika ditanami dengan tanaman tebu maka mereka hanya bisa panen sekali dalam setahun. Disamping itu juga terdapat pembakaran kebun tebu. Dengan pembakaran kebun tebu ini sudah pasti menurunkan randemen tebu, yang artinya pendapatan petani juga menurun. Pembakaran tersebut dilakukan karena masa tebang tebu ideal tidak tepat lagi, sehingga petani memaksa agar tebu dapat segera ditebang. Selain itu pembakaran juga dilakukan karena lahan petani sudah disewa oleh pihak lain.

Dalam sistem TRI ini petani juga diperkenalkan dengan ketidakpastian dan resiko usaha. Yangmana hal tersebut tidak pernah mereka hadapi sebelum mereka ikut berpartisipasi dalam sistem TRI ini. Ketidakpastian yang paling penting adalah ketika

¹ Mubyarto. 1989. "Pengantar Ekonomi Pertanian". Jakarta: LP3S. Hlm: 12

² Anne Booth dan William J. O. 1988. "Sejarah Ekonomi Indonesia". Jakarta: LP3ES. Hlm: 41

³ Mubyarto. 1984. *Masalah Industri Gula Di Indonesia*. Yogyakarta: BPFE. Hlm. 86

⁴ Instruksi Presiden Republik Indonesia No.9 Tahun 1975 tentang Intensifikasi Tebu Rakyat

⁵ Mubyarto & Daryanti. 1991. *Gula: Kajian Sosial-Ekonomi*. Yogyakarta: Aditya Media. Hlm. 74

⁶ Hamid, Edy Suandi. *Beberapa Permasalahan Tebu Rakyat Intensifikasi dan Industri Gula Indonesia*. Universitas Islam Indonesia

⁷ Surabaya post. Rabu, 28 Juli 1976. *Intensifikasi Tebu Rakyat Sudah Bisa Dirasakan*. Hlm. 6

pendapatan petani mulai naik turun⁸. Ketidakpastian tersebut dikarenakan oleh besarnya atau tingkat randemen dan terlambatnya kredit yang diberikan oleh BRI, sehingga petani juga terlambat dalam menerima bibit dan pupuk.

Pada tahun 1992, pemerintah mengeluarkan UU No. 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman. Yangmana dalam salah satu pasalnya, yakni pada pasal 6 disebutkan bahwa petani memiliki kebebasan dalam memilih jenis tanaman yang hendak dibudidayakan⁹. Namun sosialisasi akan undang-undang tersebut nampaknya belum sampai ke petani, sehingga petani belum banyak yang mengetahui akan peraturan tersebut. Dengan begitu pemerintah masih mengharuskan petani untuk berpartisipasi dalam program TRI, dan pemerintah juga masih memaksa petani untuk membeli pupuk tablet.

METODE PENELITIAN

Dalam penulisan sejarah, maka harus menggunakan metode penelitian sejarah. Dalam hal ini metode penelitian sejarah terdiri dari 4 langkah, yaitu : heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi¹⁰. Tahapan yang pertama yaitu heuristik, yangmana dilakukan proses mencari, menemukan dan mengumpulkan sumber sejarah yang bisa mendukung dalam penelitian sejarah. Sumber sejarah ada dua, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Hasil penemuan sumber dalam penelitian ini yaitu berupa tesis dan skripsi dari mahasiswa lain, jurnal yang relevan, arsip berupa Inpres mengenai pelaksanaan TRI hingga Inpres mengenai penghentian program TRI, koran yang sezaman seperti Surabaya post keluaran tahun 1976-1997, terdiri dari data pelaksanaan TRI, hingga permasalahan yang dihadapi oleh petani selama pelaksanaan TRI.

Tahap selanjutnya yaitu kritik sumber, peneliti melakukan pengujian terhadap sumber yang telah diperoleh. Tujuannya yaitu untuk menyeleksi data menjadi sebuah fakta. Dalam penelitian ini, kritik intern dilakukan dengan menyeleksi pemberitaan yang berasal dari majalah tempo, Koran Surabaya post, dan instruksi presiden. Dengan dilakukan seleksi berita tersebut, maka akan memperoleh suatu fakta. Setelah melakukan kritik, tahap selanjutnya yaitu interpretasi. Peneliti melakukan penafsiran mengenai fakta sejarah, dan mencari hubungan antara fakta yang satu dengan yang lainnya yang kemudian ditafsirkan. Setelah menemukan fakta-fakta sejarah, tahapan yang terakhir adalah historiografi yaitu tahap penulisan sejarah. Historiografi merupakan tahap akhir dalam penulisan sejarah. Dalam tahap ini rangkaian fakta yang telah ditafsirkan dalam tahap interpretasi, disajikan secara

tertulis sebagai suatu kisah atau cerita sejarah¹¹. Penulis menerangkan semua data yang telah diinterpretasikan berdasar pada prinsip kronologi. Tahap ini merupakan tahap terakhir bagi penulis untuk menyajikan semua fakta ke dalam bentuk tulisan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengusahaan Tanaman Tebu di Jawa Timur Tahun 1975-1997

Pengusahaan tanaman tebu di Jawa merupakan hasil peninggalan dari zaman kolonial, dimana tanah sawah milik petani desa disewa selama 15-16 bulan secara bergiliran dengan desa-desa lain dalam wilayah kerja pabrik gula. Mulanya petani hanya menyewakan lahan sawah mereka kepada pabrik gula, namun seiring berjalannya waktu terjadi perdebatan antara petani dengan pihak pabrik gula. Perdebatan tersebut dikarenakan petani yang merasa uang sewa dari pabrik gula terlalu sedikit. Akhirnya pemerintah menjadi penengah atas permasalahan petani dengan pabrik gula. Sehingga dikeluarkannya Inpres No. 9 Tahun 1975 mengenai Tebu Rakyat Intensifikasi. Tujuannya agar menghindari sistem sewa dan menjadikan petani sebagai tuan di atas lahan mereka sendiri.

Dalam proses pelaksanaan sistem TRI ini pengusahaan tanaman tebu sepenuhnya dilakukan oleh petani, sedangkan pabrik gula hanya sebagai pengolahnya. Pelaksanaan TRI dilaksanakan secara bertahap, yangmana dalam pengusahaan tebu di Jawa Timur dibedakan menjadi dua yakni tebu rakyat yang ditanam di lahan sawah dan lahan tegalan, dan tebu milik pabrik gula¹². Terdapat perbedaan antara TRI lahan sawah dan TRI lahan tegalan, perbedaan tersebut terlihat dari sistem lahan dan waktu pengeprasannya. TRI yang dilaksanakan di lahan sawah memperoleh sistem pengairan yang cukup bagus dan dikepras 2 kali yakni TRI Sawah I dan II, namun TRI yang dilaksanakan di lahan tegalan dilaksanakan di lahan yang kering dan dikepras 3 kali yakni TRI Tegalan I, II, dan III. Selain TRI sawah dan TRI tegalan, ada juga istilah TRI kredit dan TRI non kredit. Perbedaannya yaitu TRI non kredit tidak memanfaatkan fasilitas kredit yang diberikan oleh pemerintah.

Selama proses pelaksanaan TRI terdapat pihak yang terlibat, yaitu Satpel atau satuan pelaksana Bimas yang bertugas untuk melakukan pembinaan kepada petani. Selain itu juga terdapat KUD (Koperasi Unit Desa), BRI dan pabrik gula. BRI bertugas untuk

⁸ Mubyarto, Op. Cit., 22

⁹ Soetrisno, Loekman. 1999. *Pertanian Pada Abad ke 21*. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan. Hlm. 19

¹⁰ Aminudin Kasdi. 2005. *Memahami Sejarah*. Surabaya: Unesa University Press. Hal: 10

¹¹ Ibid, 11

¹² A. Husni Malian dan Amiruddin Syam. "Daya Saing Usahatani Tebu di Jawa Timur". FAE. Vol.14 No.1 (Juli, 1996). Hlm : 2

memberikan kredit. Pada mulanya BRI memberikan kredit langsung kepada petani. Namun pada tahun 1981 sistemnya berubah yangmana BRI memberikan kredit melalui perantara KUD. KUD disini berfungsi sebagai pelaksana program yangmana tugasnya untuk menyalurkan kredit dan mengatur pasokan tebu ke pabrik gula. Selanjutnya ada pabrik gula, yang bertugas untuk mengolah tebu menjadi gula. Pabrik gula juga memiliki tanggungjawab mengenai ketersediaan bibit tebu. Selain itu pabrik gula juga bertugas untuk membimbing petani dan menjadi pimpinan lapangan. Selain itu juga terdapat Bulog, yang bertugas untuk mengendalikan stabilisasi harga gula nasional.

Petani harus melalui beberapa tahap untuk bisa melakukan program TRI. Ada beberapa tahapan yang harus dilalui petani. Tahapan pertama yakni dengan mendaftar kelompok tani kepada KUD. Setelah itu mereka mengisi formulir supaya bisa mendapatkan kredit, selanjutnya formulir diserahkan ke BRI. Setelah semuanya selesai, petani dapat memperoleh kredit yang disalurkan oleh KUD.

Program TRI dilakukan di beberapa daerah yang petaninya belum memiliki pengalaman dalam menangani sendiri usaha tani tebu. Petani diberikan kurun waktu untuk belajar dan mendapatkan pengalaman sendiri mengenai usaha tebu, sehingga mereka bersedia dan melakukan usaha tani sendiri secara mandiri.

Pola penanaman tebu dilakukan melalui kerjasama antara petani dan pabrik gula. Petani dan pabrik gula menerapkan berbagai ketentuan yangmana telah termuat dalam Surat Keputusan Menteri Pertanian-Ketua BP Bimas No. 001-1978 mengenai Tebu Rakyat Intensifikasi tanaman 1979-1980¹³. Menurut ketentuan tersebut, petani menyatakan bahwa mereka belum mampu untuk mengusahakan lahan miliknya sendiri dan mereka bersedia untuk menyerahkan seluruh kredit TRI yang diterima dari BRI ke pihak pabrik gula. Dalam Surat Keputusan Menteri Pertanian tersebut, petani menerima hasil sebanyak 25% dari gula seluruhnya yang didapat dari tanahnya, ditambah dengan 1,5 kg tetes untuk setiap tebu. Sedangkan pabrik gula menerima 75% dari hasil gula seluruhnya, ditambah dengan sisa tetes setiap tebu. Pembayaran tersebut bebas dari bunga, akan tetapi mereka memiliki kewajiban dalam hal membayar pajak dan cukai sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Pelaksanaan program TRI di Jawa Timur tidak berjalan mulus begitu saja, tentunya terdapat berbagai masalah dibelakangnya. Misalnya di desa Umbulsari, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember, terdapat beberapa petani yang menolak lahan mereka untuk ditanami tebu¹⁴. Mereka lebih memilih untuk menanam komoditas lain yang nilainya jauh lebih besar dari tebu, seperti tanaman bawang merah. Disamping itu, dengan diberlakukannya sistem TRI ini, maka petani sepenuhnya menanggung resiko kegagalan sendiri.

Sebenarnya petani enggan untuk menerima program TRI, karena masa tanam tebu yang sangat panjang, yang hampir satu tahun lebih, selain itu harga tebu juga lebih rendah jika dibanding dengan komoditi lainnya. Namun sesuai dengan kebijakan pemerintah yang tertuang dalam Inpres No. 9 Tahun 1975 mengenai program pengembangan tebu rakyat, maka petani harus menanam lahan mereka dengan tanaman tebu guna untuk menstabilkan kondisi harga gula nasional. Oleh karena itu, petani yang menanam tebu biasanya petani yang memiliki modal yang besar, sedangkan petani berskala kecil memilih untuk menanam komoditi lainnya yang masa panennya jauh lebih cepat dibandingkan dengan masa panen tanaman tebu. Hal tersebut dilakukan karena dengan menanam tebu mereka harus menunggu untuk waktu yang cukup lama, sedangkan mereka harus memenuhi kebutuhan ekonomi mereka sehari-hari. Bahkan ada juga yang lebih memilih untuk menyewakan lahan mereka ke petani modal besar, maupun ke pabrik gula, sehingga mereka tidak perlu khawatir akan kegagalan, karena mereka secara langsung mendapatkan uang sewa.

Pengusahaan tanaman tebu di Jawa Timur terdapat pola peningkatan swadana yang diterapkan oleh petani¹⁵. Menurut Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur, 1995 menyatakan bahwa dalam kurun waktu tahun 1989-1993 adanya peningkatan pola swadana yangmana rata-rata 14% setiap tahunnya, dengan keterlibatan sekitar 31% dari keseluruhan luas area tebu. Terdapat beberapa ciri umum dari petani swadana yaitu kegiatan usaha tani dengan skala yang lebih luas, pengelolaan usaha tani tebu lebih intensif, mereka lebih memiliki motivasi yang cukup tinggi untuk memperoleh lebih banyak keuntungan dari hasil usaha yang dijalankannya, serta mereka lebih menghindari sistem

¹³ Surabaya Post. Rabu, 7 Februari 1979. "Program TRI-Jasa Dimulai MT". Hlm: 8

¹⁴ Surabaya Post. Kamis, 26 Maret 1997. "Sistem Glebagan Tebu Terus Jalan". Hlm : 11

¹⁵ A. Husni Malian dan Amiruddin Syam. Op.Cit., Hlm : 4

birokrasi yang ada. Petani swadana memiliki motivasi untuk bersaing yang lebih tinggi dalam hal pemasaran tebu, sehingga mereka mampu memilih pabrik gula yang sekiranya memiliki kinerja yang lebih baik dari yang lainnya.

Sesuai dengan Inpres No, 9 Tahun 1975, petani akan menjadi tuan di atas lahannya sendiri. Namun, selama program TRI berlangsung, kedudukan petani bukan semakin kuat malah semakin lemah. Karena penyuluhan mengenai program TRI mengenai teknis pelaksanaan, bibit, sarana produksi, dan hal lainnya yang berhubungan dengan penanaman tebu dilakukan oleh lembaga yang berkuasa¹⁶. Petani tidak dilibatkan secara langsung dalam penyuluhan program TRI ini. Sehingga tujuan petani menjadi tuan rumah di atas lahannya sendiri belum tercapai. Sebagian petani justru malah menyerahkan lahan mereka kepada kelompok tani tanpa mereka ikut berpartisipasi pada kelompok taninya tersebut. Dengan begitu sistem tersebut tidak jauh berbeda dari sistem sewa tanah yang diterapkan sebelum adanya sistem TRI. Bahkan menurut Zaidan dari LBH Surabaya menyatakan bahwa program TRI tidak jauh berbeda dengan kerja paksa zaman penjajahan. Karena banyak pihak seperti kepala desa, koramil, dan polisi yang mengintimidasi dan memaksa petani untuk menanam tanaman tebu. Jika petani menghiraukan instruksi dari mereka, petani akan di sekap dan dikurung. Tentunya hal tersebut sangat bertolak belakang dengan tujuan program TRI untuk mensejahterakan rakyat. Oleh karena itu program TRI dianggap tidak jauh berbeda dengan sistem tanam paksa.

B. Kondisi Sosial-Ekonomi Petani Tebu di Jawa Timur Tahun 1975-1997

Pengalihan perusahaan tanaman tebu dari sistem sewa menuju sistem TRI, mengakibatkan banyaknya perubahan. Perubahan-perubahan tersebut dapat dikategorikan sebagai perubahan sosial. Perubahan sosial itu sendiri merupakan suatu kondisi dimana terdapat suatu pertumbuhan dan perkembangan¹⁷. Masyarakat terutama petani tebu mengalami pertumbuhan dan perkembangan, dengan melakukan adaptasi dengan lingkungan barunya untuk mencapai suatu tujuan yakni keberhasilan program TRI.

Disini petani mengalami perubahan. Perubahan tersebut dilihat dari tanaman yang di usaha tanikan di lahan sawah mereka. sebelum diperkenalkannya dengan sistem TRI, petani menanam lahan mereka dengan tanaman seperti padi, jagung, sayur-sayuran, dll, sehingga mereka dapat memperoleh sumber energi pangan. Namun, ketika sistem TRI mulai diberlakukan maka petani sepenuhnya menggunakan lahan mereka untuk pengusahaan tanaman tebu.

Terdapat juga perbedaan yang cukup signifikan antara sistem TRI dan sistem sewa tanah. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari banyaknya pihak yang terlibat dengan kepentingan sendiri-sendiri. Dalam sistem TRI pihak yang terlibat cukup banyak dan peranan swasta semakin penting. Peranan pemerintah juga semakin besar, yang mana pemerintah berperan dalam penyampaian dan penerangan mengenai peraturan penyelenggaraan TRI.

Tebu merupakan komoditas yang memiliki arti penting bagi kehidupan perekonomian petani di Jawa Timur. Dengan menanam tebu petani berharap kondisi ekonomi mereka bisa meningkat. Karena pada hakekatnya tujuan petani dalam melakukan usaha tani yaitu supaya mereka dapat memperoleh penghasilan yang besar dengan resiko kegagalan yang kecil. Dalam melakukan usaha tani tebu ini petani juga berharap akan hal yang sama, yakni tebu dapat meningkatkan kesejahteraan hidup mereka beserta keluarga. Besar kecilnya penghasilan yang diperoleh petani dari hasil usaha tani tebu sangat mempengaruhi perkembangan industri gula nasional. Karena tebu rakyat merupakan penopang industri gula tingkat nasional. Jika penghasilan yang dihasilkan dari menanam tebu cukup tinggi, maka akan meningkatkan semangat petani dalam melakukan usaha tani tebu. Petani sudah pasti akan membandingkan hasil penghasilan dari tanaman tebu dan hasil penghasilan dari tanaman komoditi lainnya.

Setelah diterbitkannya Inpres No. 9 tahun 1975 mengenai TRI, secara jelas bahwa peranan petani tebu selaku produsen utama dalam penyediaan bahan baku tebu. Yangmana sebelumnya tugas tersebut menjadi tanggungan pabrik gula. Namun, setelah dikeluarkannya Inpres mengenai TRI, tugas tersebut berpindah ke petani selaku aktor utama dalam penyediaan bahan baku gula nasional.

Dalam program TRI petani dijadikan sebagai pengusaha di atas lahannya sendiri. Selayaknya seorang pengusaha, maka petani dihadapkan dengan resiko untung dan rugi

¹⁶ Daniel Asnur. 1999. Pelaksanaan Kebijakan Tebu Rakyat Intensifikasi (TRI). Jakarta: Departemen Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Badan Penelitian dan Pengembangan Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah.

¹⁷ Sartono Kartodirjo. 1992. *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. Hlm :162

atas usaha yang dijalannya. Hal tersebut sangat berbeda jauh ketika sebelum diadakannya program TRI, yangmana petani langsung mendapatkan uang sewa secara pasti dari pabrik tanpa harus menanggung kegagalan.

Produktivitas tebu sangat mempengaruhi besar kecilnya penghasilan yang diperoleh petani. Hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya yaitu tingkat produktivitas tanah, skema pergiliran tanaman, dan kecakapan petani dalam mengelola usaha yang dijalannya. Dalam program TRI petani mendapatkan penghasilan dari sistem bagi hasil dengan pabrik gula. Karena pabrik gula berperan dalam proses penggilingan tebu menjadi gula. Penghasilan petani juga dipengaruhi oleh pemerintah mengenai kebijakan harga gula nasional. Semakin tingginya kebijakan akan penetapan harga gula, maka akan merangsang petani dalam menanam tebu, petani akan lebih bersemangat dalam melakukan usaha tani tebu.

Ada beberapa pokok permasalahan yang mewarnai proses pelaksanaan program TRI. Permasalahan tersebut diantaranya masalah mengenai lahan, masalah biaya, usaha budidaya, tenaga kerja, panen dan pasca panen¹⁸. Tebu merupakan tanaman tahunan yang masa panennya terbilang membutuhkan waktu yang cukup lama, maka petani pemilik lahan lebih memilih untuk lahan mereka ditanami dengan tanaman lainnya yang lebih menguntungkan dan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Dengan begitu maka lahan yang diperuntukkan untuk tanaman tebu semakin berkurang. Lahan sempit juga menyulitkan petani untuk menggarapnya sendiri, sehingga mereka lebih memilih menyewakan lahan mereka kepada pabrik gula. Sehingga tujuan menjadikan petani menjadi tuan di atas lahannya sendiri belum tercapai.

Masa tunggu panen tebu memerlukan waktu yang cukup lama. Dalam waktu masa tunggu tersebut, petani juga membutuhkan biaya untuk hidup. Meskipun mereka juga mendapat kredit dari bank, namun seringkali terjadi proses keterlambatan pencairan dana kredit. Dengan adanya keterlambatan pencairan kredit, menjadikan kegiatan petani juga terhambat. Keterlambatan pencairan kredit menjadikan produksi tebu tidak tepat. Sedangkan sukses tidaknya usaha tani tebu dipengaruhi oleh ketepatan waktu.

TRI menjadikan petani semakin sengsara. Banyak pihak yang terlibat dalam pelaksanaan TRI, yangmana pihak tersebut juga secara tidak langsung merugikan petani. Pamong desa yangmana bertugas untuk memastikan lahan petani ditanami tebu, namun mereka tidak bersedia jika lahan mereka sendiri yang ditanami tebu. Dalam pelaksanaan program TRI terdapat ketua kelompok, yangmana biasanya ketua kelompok merupakan petani kaya yang memiliki cukup banyak modal. Disini petani kaya juga sering mengambil kesempatan dari petani. Mereka membeli tebu milik petani dengan sistem kiloan. Mereka menjualnya ke pabrik gula lain, bukan dari pabrik yang ditugaskan untuk menggiling di kelompok tersebut. Dengan begitu petani banyak yang merasa jera, jika harus menanam tebu lagi. Sehingga mereka melakukan berbagai macam pemberontakan diantaranya yaitu membiarkan tebu terbakar hingga menjadi kayu bakar.

Terdapat 1500 ton lebih tebu yang mangkrak, terbengkalai karena dihentikan masa gilingnya. Hal tersebut terjadi karena petani merasa di nomor duakan. Sebab pabrik gula lebih memilih tebu dan dari daerah lain ketimbang tebu lokal. Jika hal tersebut dibiarkan secara terus-menerus, maka akan muncul sika keengganan petani dalam melaksanakan program TRI.

Penghasilan petani dalam melakukan usaha tani tebu memang meningkat, jika dibanding dengan melakukan sewa tanah terhadap pihak pabrik gula. Namun, menurut hasil Sensus Pertanian 1983 menyatakan bahwa tingkat kesejahteraan petani tebu belum melegakan¹⁹. Hal tersebut dikarenakan masih banyak petani yang enggan untuk menggarap lahan mereka sendiri. Mereka lebih memilih menyerahkan tanah mereka ke pihak lain, seperti kelompok usaha tani maupun pabrik gula. Dengan begitu tujuan TRI untuk menjadikan petani menjadi tuan di atas lahannya sendiri belum tercapai. Peningkatan penghasilan petani dari usaha tani tebu, belum mampu meningkatkan kesejahteraan hidup petani. Karena ada beberapa daerah yang mana tebu dapat bersaing dengan komoditas lainnya, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan petani. Namun ada juga daerah yang mana tebu tidak dapat bersaing dengan komoditas lainnya, sehingga membuat petani enggan untuk ikut serta dalam program TRI.

PENUTUP Kesimpulan

18Edy Suandi Hamid. *Beberapa Permasalahan Tebu Rakyat Intensifikasi dan Industri Gula di Indonesia*. Universitas Islam Indonesia

19 Mubyarto & Daryati, Op.Cit., Hlm : 63

Berdasarkan analisa yang dilakukan dalam penelitian ini, maka diperoleh hasil bahwa pengusaha tanaman tebu di Jawa Timur pada tahun 1975-1997 menggunakan sistem TRI sesuai dengan instruksi pemerintah. Setiap petani pemilik lahan wajib ikut serta dalam program TRI tersebut. Hal itu menjadikan adanya unsur keterpaksaan petani dalam melakukan pengusaha tanaman tebu. Selain karena faktor keterpaksaan, petani juga tidak mempunyai pengalaman dan pengetahuan dalam usaha tanam tebu, sehingga hasil tebu yang dihasilkan oleh petani tidak maksimal. Kondisi sosial dan ekonomi petani tebu selama menjalankan program TRI masih belum bisa dikatakan sejahtera. Meskipun petani mengalami peningkatan pendapatan, namun peningkatan pendapatan tersebut belum mampu meningkatkan kesejahteraan hidup petani. Hal tersebut dikarenakan tanaman tebu belum bisa bersaing dengan tanaman pangan lainnya.

Dalam penelitian ini, peneliti menemukan temuan baru yaitu mengenai faktor yang menghambat proses berlangsungnya program TRI diantaranya, terdapat kesenjangan pelaksanaan paket kredit, yang imbasnya petani menjadi enggan untuk melaksanakan program TRI. Pelaksanaan paket kredit yang dinilai terlalu birokratis. Seringnya keterlambatan pencairan paket kredit. Seringnya keterlambatan bibit, adanya

bibit yang tidak memenuhi syarat karena semuanya serba terbatas. Petani dihantui oleh pihak pabrik gula mengenai masalah randemen.

Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka diharapkan dengan adanya program baru yang dikeluarkan oleh pemerintah, maka sejatinya harus mampu mensejahterakan kehidupan petani. Antara pihak pemerintah dan pihak petani harus mampu melakukan komunikasi yang baik, agar program yang dijalankan berjalan dengan baik, sesuai dengan tujuan utama yaitu mensejahterakan petani tebu. Adanya berbagai masalah dalam proses pelaksanaan sistem TRI ini menunjukkan bahwa kurangnya komunikasi antara pihak petani tebu dengan pemerintah. Maka diharapkan pihak-pihak yang membantu dalam proses pelaksanaan TRI agar lebih terbuka lagi. Selain itu petani harus diberikan motivasi lebih agar mereka mau menjalankan program yang telah dikeluarkan oleh pemerintah.

Semoga penelitian ini dapat memberikan sumbangsih terhadap ilmu pengetahuan, bisa menjadi bahan bacaan yang bermanfaat, menambah wawasan mengenai sejarah pertanian, dan dapat dijadikan sebagai bahan penelitian selanjutnya terutama mengenai sejarah pertanian tebu di Jawa Timur.

Daftar Pustaka

A. Arsip & Dokumen

- Inpres Nomor 9 tanggal 22 April 1975 tentang Tebu Rakyat Intensifikasi (TRI)
Inpres Nomor 5 Tahun 1997 tentang Pengembangan Tebu Rakyat
Inpres Nomor 5 Tahun 1998 tentang Penghentian Program Pelaksanaan Pengembangan Tebu Rakyat

B. Buku

- Booth, Anne dan William J.O. 1998. *Sejarah Ekonomi Indonesia*. Jakarta : LP3ES
Geertz, Clifford. 1983. *Involusi Pertanian : Proses Perubahan Ekologi di Indonesia*. Jakarta : Bharata Karya Aksara
Haryono, Bambang. 2013. *Sari Tanaman Bahan Baku Industri tebu*. Tanpa Kota : PT Trisula Adisakti
Kartodirjo, Sartono. 1992. *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama
Kasdi, Aminudin. 2005. *Memahami Sejarah*. Surabaya: Unesa University Press
Mubyarto. 1984. *Masalah Industri Gula di Indonesia*. Yogyakarta : BPFE
Mubyarto. 1989. *Pengantar Ekonomi Pertanian*. Jakarta : LP3S
Mubyarto & Daryati. 1991. *Gula : Kajian Sosial-Ekonomi*. Yogyakarta : Aditya Media
Soetrisno, Loekman. 1999. *Pertanian Pada Abad ke 21*. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

C. Jurnal/ Skripsi

- Asnur, Daniel. 1999. *Pelaksanaan Kebijakan Tebu Rakyat Intensifikasi (TRI)*. Jakarta: Departemen Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Badan Penelitian dan Pengembangan Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah
Dwianto, Prima. 2014. *Korporatisme Pedesaan Orde Baru : Program Tebu Rakyat Intensifikasi (TRI) di Wilayah Kerja Pabrik Gula Mojo Sragen, 1975-1998*. Jurnal Lembaran Sejarah. Vol. 11, No. 2
Hamid, Edy Suandi. *Beberapa Permasalahan Tebu Rakyat Intensifikasi dan Industri Gula Indonesia*. Universitas Islam Indonesia
Malian, Husni dan Amiruddin Syam. 1996. *Daya Saing Usaha Tani Tebu di Jawa Timur*. FAE. Vol. 14, No. 1
Rachmat, Muchidin. *Profil Tebu Rakyat di Jawa Timur*. Bogor : Peneliti Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian

D. Koran & Majalah

- Majalah Tempo. *Para Petani itu menangis Lagi*. Edisi 30 Juli 1988
Surabaya Post. *Intensifikasi Tebu Rakyat Sudah Bisa Dirasakan*. 28 Juli 1976
Surabaya Post. *Program TRI- Jasa Dimulai MT Tahun Ini*. 7 Februari 1979
Surabaya Post. *Komisi C Berbicara Tentang Tebu Rakyat di Situbondo*. 14 Maret 1979
Surabaya Post. *Masalah TRI dan Gula di Jember*. 19 Februari 1981

Surabaya Post. *TRI Belum Mencapai Sasaran*. 21 Oktober 1981
Surabaya Post. *Tujuh Petani TRI Jawa Timur Mengadu Lewat LBH Yogyakarta*. 23 Agustus 1983
Surabaya Post. *TRI Perlu Dievaluasi*. 28 April 1995
Surabaya Post. *1500 Ton TRI PG Gending Mangkrak*. 27 November 1995
Surabaya Post. *Sistem Glebagan Tebu Terus Jalan*. 26 Maret 1997
Surabaya Post. *Pakmei 1995*. 30 Juni 1995

